

**Faktor-Faktor Keuangan yang Mempengaruhi Internet *Financial Reporting* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

**Nadia Amanda<sup>1</sup>, Siska Aprianti<sup>2</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya

ndiamndaaa@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Internet Financial Reporting (IFR) may be a instrument for uncovering government money related reports by means of the web or websites possessed by neighborhood governments. Distribution of government monetary reports by means of e-Government is known as Web Monetary Announcing (IFR). The government employments the web to publish its budgetary reports as one step to extend straightforwardness. By giving get to to the open, the government looks for to appear the open how its funds are overseen. Past considers have found that the straightforwardness of neighborhood government budgetary reports is frequently impacted by the money related conditions of the locale. In this consider, IFR is measured utilizing the factors use and budgetary reliance. Board information for this think about were gotten from inspected territorial money related reports from 17 districts/cities in South Sumatra Area in 2018-2022 with a add up to investigate test of 85. Testing utilizing the SPSS 29 program. The test comes about concluded that use had an impact on web budgetary announcing, whereas budgetary reliance had no impact on internet financial reporting (IFR).*

**Keywords:** *Internet Financial Reporting, Leverage dan Fianancial Dependence*

**ABSTRAK**

*Internet Financial Reporting (IFR) merupakan suatu mekanisme dalam mengungkapkan laporan keuangan pemerintahan pada internet ataupun situs website yang ada pada pemerintahan daerah. Publikasi laporan keuangan pemerintahan pada e-Government yang dikenal dengan Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintahan memakai internet agar mempublikasikan laporan keuangan mereka sebagai langkah agar memberi peningkatan transparansi. Dengan menyediakan akses kepada publik, pemerintahan berupaya memberi petunjuk kepada publik bagaimana keuangan mereka dikelola. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah menemukan jika transparansi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah sering kali dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah itu. Di penelitian ini, Internet Financial Reporting diukur memakai variabel leverage dan financial dependence. Data panel penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan daerah audited 17 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 dengan total 85 sampel penelitian. Pengujian memakai bantuan program SPSS 29. Hasil pengujian mendpatkan kesimpulan jika leverage punya pengaruh terhadap internet financial reporting, sementara financial dependence tidak punya pengaruh terhadap internet financial reporting (IFR).*

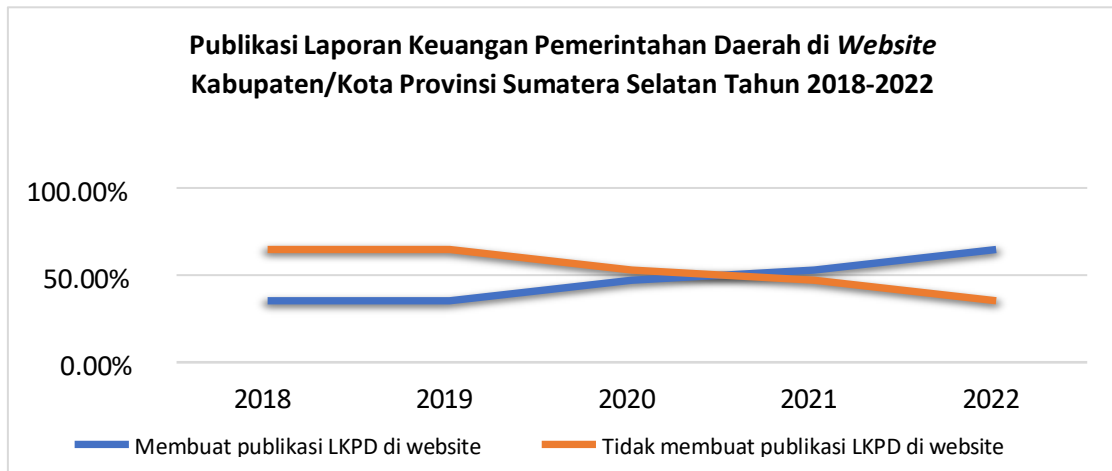
**Kata kunci:** *Internet Financial Reporting, Leverage dan Fianancial Dependence*

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat hingga diperkirakan jika Layanan Pemerintahan Daerah akan dapat memberi ungkapan laporan keuangan mereka. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang Transparansi Informasi Publik, ketersediaan dan transparansi informasi sektor publik di Indonesia makin meningkat. Tujuan tidak langsung dari Undang-Undang ini adalah agar memaksa pemerintahan agar merilis informasi publik dengan cara yang lebih terbuka dan bertanggung jawab dan agar memprioritaskan layanan publik yang mudah, cepat, efisien, dan mudah diakses.

Salah satu karakteristik administrasi terkait uang dan juga merupakan komponen penting dalam memberi perwujudan administrasi yang baik. Makin berkembangnya data terkait uang, makin sedikit tuntutan agar mendapatkan informasi. Sama seperti internet, inovasi ini mempermudah setiap klien agar memperdagangkan data dengan cepat dan mudah. Dalam kemajuan inovasi yang canggih, terkhusus pada bidang data internet, hingga banyak klien web di antara komunitas akhirnya merefleksikan jika internet adalah kebutuhan yang sangat penting. adanya pegangan digitalisasi di semua organisasi karena pembiayaan yang umumnya lebih murah ketika memanfaatkan inovasi dalam penyampaian data dan pengendalian data serta inovasi komunikasi yang dapat mendorong dan memberi peningkatan tingkatan pergerakan substansi keuangan, yang pada awalnya dilakukan secara fisik dan biasa sependapat dengan Puspita dan Martani dalam Hudoyo dan Mahmud (2014). Perkembangan web sebagai media data telah membuat suatu pemikiran modern dalam dunia pembukuan sehubungan dengan akomodasi laporan moneter pada web atau yang dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR).

*Internet Financial Reporting* (IFR) atau pendistribusian laporan anggaran pada web merupakan suatu tindakan yang dapat dibuat oleh pemerintahan daerah dalam memberi perwujudan keterbukaan dan tanggung jawab, hingga seluruh pihak yang punya kepentingan akan punya kesempatan yang sesuai agar mendapatkan data yang dibutuhkan.



**Gambar 1. Grafik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang Membuat publikasi dan Tidak Membuat publikasi Laporan Keuangan di Website Tahun 2018-2022**

Sumber: BPKAD Provinsi Sumsel Yang Diolah (2024)

Didasarkan grafik di atas dapat dilihat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan yang membuat publikasi LKPD di website meningkat dalam 4 tahun (2018-2022). Pada tahun 2018 dan 2019 tercatat 35,29% Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasi LKPD di Website. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 35,29% menjadi 47,06%. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu 52,94%, dan tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yaitu 64,71%. Hal ini memberi petunjuk adanya peningkatan partisipasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat publikasi LKPD dari tahun ke tahun. Namun dilihat dari rata-rata persentase pemerintahan daerah yang membuat publikasi laporan keuangan pada website resminya masih cukup rendah, sekitar 47,06%. Angka itu belum menyentuh setengah dari jumlah pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan menandakan jika pengelolaan website pemerintahan daerah kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebagai sarana dalam memberi perwujudan transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori agensi dapat berupa teori yang memberi klarifikasi tentang hubungan kerja antara spesialis dan prinsipal didalam bentuk mengambil keputusan. Yang paling utama sebagai pemilik spesialis memiliki ketergantungan di spesialis dan kewajibannya kepada operator agar membuat pilihan yang bisa memenuhi antarmuka prinsipal. Perselisihan kepentingan yang terjadi jika spesialis harus memiliki keuntungan agar kepentingan pusat, sementara operator yang sudah bekerja akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan antara operator dan vital.

Dalam organisasi pemerintahan, pihak yang punya kepentingan (prinsipal) dan pembuat kebijakan (operator dalam divisi terbuka) berbagi manfaat dan biaya.

Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat jika hubungan spesialis-vital yang terjadi antara pemilih dan dewan pada dasarnya memberi petunjuk bagaimana pemilih memilih anggota parlemen agar membuat pilihan seputar investasi terbuka bagi mereka dan mereka memberi cadangan dengan membayar biaya. Pada kenyataannya dewan sebagai spesialis untuk yang terbuka tidak secara terus menerus memiliki antarmuka yang sama dengan yang terbuka, seperti yang diungkapkan oleh (Groehendijk, 1997) tanpa keraguan, hubungan antara pemilih dan anggota parlemen dalam sebuah agen pemerintahan yang populer dapat dianggap sebagai hubungan spesialis pusat.

Teori ini dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang mengusulkan jika teori keagenan adalah hubungan kontrak antara prinsipal dan agen, tetapi hubungan ini tidak selalu lancar dan seringkali ada konflik kepentingan antara keduanya. Jensen & Meckling (1977) juga memberi pernyataan jika teori keagenan di sektor publik adalah hubungan keagenan antara rakyat dan pemerintahan daerah yang terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan oleh rakyat sebagai prinsipal dan memakai pemerintahan sebagai agen agar menyiapkan jasa.

### **Laporan Keuangan**

Laporan terkait uang menggambarkan posisi moneter perusahaan dan pelaksanaannya pada periode waktu tertentu. Komponen yang secara khusus terkait dengan estimasi posisi moneter adalah sumber daya, kewajiban, dan nilai. Sementara komponen yang terkait dengan eksekusi adalah upah dan biaya yang terkandung dalam artikulasi upah. Hingga kesimpulannya didapat jika penjelasan terkait uang adalah item dari persiapan pembukuan. Laporan keuangan ini merupakan data yang akan menjadi acuan bagi klien dalam menentukan pilihan.

laporan keuangan wajib disusun bersamaan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Didasarkan PSAK 01 yang direviu kembali pada tahun 2013, total artikulasi moneter diantaranya komponen-komponen berikut ini: Laporan keuangan pada akhir periode, Artikulasi keuntungan atau kerugian dan imbalan komprehensif lain pada periode, Penjelasan perubahan nilai pada periode, Penjelasan arus kas pada periode, Catatan atas artikulasi moneter, dan Penjelasan posisi anggaran pada awal periode yang lalu.

### ***Internet Financial Reporting***

*Internet Financial Reporting* (IFR) e-Government dapat menjadi komponen agar membuka laporan anggaran pemerintahan pada web atau situs web yang dimiliki oleh pemerintahan-pemerintahan di sekitarnya. Penyebaran laporan keuangan pemerintahan pada *e-Government*, yang dikenal dengan sebutan Internet Financial Reporting (IFR), merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban administrasi keuangan daerah secara terbuka. Bagaimanapun, sejauh ini

pengungkapannya lebih bersifat disengaja (*deliberate divulgence*) karena tidak ada sanksi yang terkait jika tidak dipenuhi. Karena hal ini, Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan jika tidak semua pemerintahan daerah terdekat mempublikasikan laporan anggaran mereka secara lengkap setiap tahun, hingga memberi penyebab pada pembeda kualitas dan data moneter antara pemerintahan daerah terdekat.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap *Internet Financial Reporting***

*Leverage* atau kewajiban merupakan komponen penting dalam pembiayaan menurut Hery (2017). Pemakaian dapat diketahui dengan menilai bahaya yang terkandung dalam perusahaan. Secara umum, spekulasi cenderung menjaga jarak strategis dari perusahaan yang memiliki pemakaian ekspansif karena makin besar proporsi pemakaian, makin besar pula peluang yang akan dibebankan, terutama ketika perusahaan tidak bisa memenuhi komitmennya tepat waktu. Kasmir (2016) mengkarakterisasi jika proporsi pembubaran atau proporsi pemakaian dipakai agar mengukur sejauh mana sumber daya perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Salah satu proporsi yang dipakai dalam pendanaan, lebih spesifiknya proporsi pemakaian, dapat menjadi alat yang dipakai agar mengukur beberapa banyak toko yang akan diiklankan oleh pemilik perusahaan dibandingkan dengan cadangan yang akan didapatkan dari penyewa (Intyas & Abidin, 2018). Makin tinggi tingkatan pemakaian yang dimiliki perusahaan, makin besar kemungkinan perusahaan akan melaporkan keuntungan yang sangat tinggi (Halida, 2020).

Hal ini mendukung pada penelitian yang dibuat oleh Husna & Priyadi (2018), Nassir Zadeh et al. (2018) Andriyani & Rina (2017), dan Yassin (2017) yang memberi pernyataan jika pemakaian termasuk dampak yang patut dicatat pada Web Money terkait Pengumuman tetapi pertanyaan ini tidak mendukung pada penelitian Putri & Nur (2020), Ayuningtias & Khairunnisa (2019), Kurniawati (2018), Arfianda (2017), dan Aboutera & Hussein (2017) yang memberi pernyataan jika pemakaian tidak memiliki dampak.

H1: *Leverage* punya pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

### **Pengaruh *Financial Dependence* Terhadap *Internet Financial Reporting***

*Financial Dependence* merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu pemerintahan dari pemerintahan, biasanya didalam bentuk hibah, bantuan, atau transfer dana agar mendukung berbagai program dan layanan publik tingkatan ketergantungan pemerintahan daerah (Robbins & Austin, 1986). Pertukaran dari pusat dipandang sebagai kekuatan pendorong bagi kepala daerah karena memiliki bantuan pertukaran ini, kepala daerah bisa membuat hal-hal yang memberi keuntungan bagi kemajuan daerahnya, seperti mempercepat kemajuan, mengurangi biaya penilaian lingkungan, memajukan harta benda daerah, dan seterusnya (Ingram dan DeJong, 1987). Keterusterangan sebagai kewajiban politik untuk penerimaan cadangan devisa yang didapatkan oleh pemerintahan daerah. Hasil penelitiannya memberi petunjuk jika makin tinggi cadangan devisa yang didapatkan pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah akan makin terbuka dalam memberi petunjuk

data (Guillamón, et al., 2011). Di Indonesia, ketergantungan pemerintahan daerah tercermin dalam estimasi Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian yang dibuat oleh Inkuiri merekomendasikan jika daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar memiliki tingkatan pengungkapan data moneter yang sangat tinggi (Martani, et al., 2014).

Demikian menurut penelitian sebelumnya yang sudah dibuat oleh Hilmi & Martani (2012) yang memberi kesimpulan jika tidak dibuktikan adanya pengaruh *financial dependence* (tingkatan ketergantungan) yang diukur memakai rasio dana transfer dengan pendapatan total, terhadap *Internet Financial Reporting*. Selanjutnya Penelitian yang tidak sejalan dibuat oleh Puspita dan Martani (2012) memberi pernyataan jika *Financial Dependence* mempunyai pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*.

H1: *Financial Dependence* punya pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

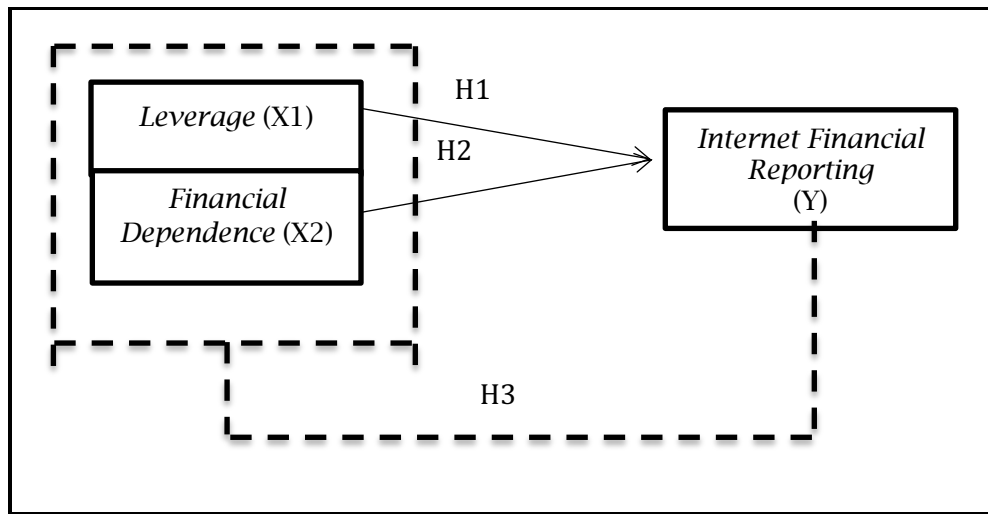
### **Pengaruh *Leverage* dan *Financial Dependence* Terhadap *Internet Financial Reporting***

Dalam era digital yang terus berkembang, *Internet Financial Reporting* (IFR) sudah menjafi suatu metode utama bagi perusahaan agar menyampaikan informasi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan. Ada bermacam faktor yang diperkirakan memberi pengaruh adopsi IFR oleh perusahaan, di antaranya adalah *leverage*, dan *financial dependence*.

*leverage* adalah salah satu proporsi yang berhubungan dengan uang. Kapasitas perusahaan agar membayar komitmen jika perusahaan dijual. Perusahaan dengan tingkatan pemakaian yang tinggi memberi petunjuk jika makin penting latihan perusahaan didukung pada kewajiban. Makin tinggi pemakaiannya, makin tinggi pula peluang perusahaan karena ada kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi komitmennya. Proporsi pemakaian memberi gambaran beberapa besar perusahaan dibiayai oleh kewajiban dengan kemampuan perusahaan didasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

*Financial Dependence* dapat berupa tingkatan ketergantungan, sependapat dengan Patrick (2007) Tingkatan Ketergantungan Teritorial dapat berupa pendapatan pemerintahan daerah yang berasal dari transfer pemerintahan pusat atau pemerintahan umum kepada pemerintahan daerah agar mendanai operasi pemerintahan di sekitarnya. Tingkatan ketergantungan yang sangat tinggi cenderung memperpanjang pemekaran.

H3: *Leverage*, dan *Financial Dependence* punya pengaruh secara simultan terhadap *Internet Financial Reporting* pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Peneliti (2024)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Jenis informasi yang dipakai merupakan informasi pendukung berupa laporan anggaran pemerintahan daerah dari situs BPK RI dan situs BPKAD Provinsi Sumsel. Populasi yang dipakai didalam penelitian inimerupakan semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022. Pemakaian sampel jenuh hingga terdapat 85 Sampel yakni 17 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu selama 5 tahun. Teknik pengumpulan data di penelitian ini pada pengambilan data secara tidak langsung. Dimana penelitian ini memakai data sekunder yang merupakan data penelitian yang didapatkan pada perantara atau laporan keuangan tahunan.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	proksi	Skala
<i>Internet financial reporting</i> (Y)	<i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dapat menjadi komponen agar mengungkap laporan keuangan perusahaan pada web atau pada situs online yang dimiliki perusahaan.	Jika pemda melaporkan laporan keuangan di web pemda akan diberikan angka "1", jika tidak melaporkan akan diberikan angka "0"	<i>Dummy Variable</i>

<i>Leverage</i> (X1)	leverage dapat menjadi alat agar mengukur beberapa besar perusahaan memiliki ketergantungan di pemberi pinjaman dalam membiayai sumber daya perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkatan pemakaian yang tinggi menyiratkan jika perusahaan itu sangat memiliki ketergantungan di pinjaman dari luar agar membiayai sumber dayanya. Sementara perusahaan yang memiliki tingkatan pemakaian yang rendah lebih banyak membiayai sumber dayanya dengan modal sendiri.	DER = $\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
<i>Financial Dependence</i> (X2)	Ketergantungan anggaran adalah ketergantungan pemerintahan daerah Di Indonesia, ketergantungan pemerintahan daerah dapat dilihat dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU). Berbagai penelitian memberi petunjuk jika kabupaten yang mendapatkan DAU lebih besar memiliki tingkatan pengeluaran anggaran yang sangat tinggi.	$\frac{\text{Total DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio

Sumber: Data yang Sudah Diolah (2024)

Persamaan analisis regresi logistik didalam penelitian ini dirumuskan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Didalam metode analisis regresi logistik pengujian yang dibuat pada bermacam pengujian yaitu:

1. Analisis Statistik Data yang diantaranya Uji *Overall Model Fit*, Uji *Goodness of Fit Test*, Uji *Nagelkerke's R Square* dan Uji Matriks Klasifikasi
2. Uji Regresi Logistik
3. Uji Hipotesis yang diantaranya Uji Parsial (Uji t), dan Uji Simultan (f).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Statistik Data**

**1. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

**Tabel 1. Hasil Uji *Overall Model Fit*  
Iteration History**

-2Log likelihood awal ( <i>block number</i> = 0)	106.264
-2Log likelihood akhir ( <i>block number</i> = 1)	88.914

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Didasarkan hasil output pada tabel 1 yang didapatkan dari hasil analisis regresi memberi petunjuk jika nilai -2Log likelihood awal (*block number* = 0) sebelum dimasukkan ke dalam variabel independen sekitar 106.264. Sesudah kedua variabel independen dimasukkan, maka nilai -2Log likelihood akhir (*block number* = 1) mengalami penurunan menjadi 88.914 Selisih antara -2Log likelihood awal dengan -2Log likelihood akhir memberi petunjuk penurunan sekitar 17.350. Didapatkan kesimpulan jika nilai -2Log likelihood awal (*block number* = 0) lebih besar daripada nilai -2Log likelihood akhir (*block number* = 1), hingga terjadinya penurunan. Hal ini memberi indikasi jika diantara pemodelan yang dihipotesiskan sudah sesuai (*fit*) dengan data, hingga penambahan variabel independen ke dalam model memberi petunjuk jika model regresi makin baik atau dengan kata lain  $H_0$  diterima.

**2. Menguji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)**

**Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model  
Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.736	8	.163

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Didasarkan tabel diatas yang didapatkan dari hasil analisis regresi memberi petunjuk jika hasil uji *Hosmer and Lemeshow Test* didapatkan nilai *chi-square* sekitar 11,736 dengan tingkatan signifikansi sekitar 0.163. Hasil uji memberi petunjuk jika nilai probabilitas (*p-value*)  $\geq 0,05$  (nilai signifikan) yaitu  $0.582 \geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Hal ini memberi indikasi jika tidak ada perbedaan signifikan diantara pemodelan dengan data hingga model regresi didalam penelitian ini layak dan bisa memberi prediksi nilai observasinya.

**3. Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)**

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	88.914 <sup>a</sup>	.185	.259

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Didasarkan tabel diatas yang didapatkan dari hasil analisis regresi memberi petunjuk jika nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Nagelkerke's R Square* sekitar 0.259. Hal ini memberi indikasi jika kemampuan variabel independen yaitu *leverage* dan *financial dependence* yang dipakaidalam memberi penjelasan variabel dependen yaitu *internet financial reporting* hanya sekitar 25,9%. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar dari model penelitian ini.

**4. Matriks Klasifikasi**

**Tabel 4. Hasil Uji Matriks Klasifikasi Classification Table**

Observed		Predicted		
		Y		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	Y	0	1	
		10	17	37.0
	1	5	53	91.4
	Overall Percentage			74.1

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Didasarkan hasil output pada tabel 4 yang didapatkan dari hasil analisis regresi menunjukkan jika jumlah Pemda yang tidak melapor  $10 + 17 = 27$  Laporan Keuangan. Pemda yang benar-benar tidak melapor sekitar 10 pemda dan yang seharusnya tidak melapor tetapi melapor sekitar 17 Pemda. Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang melapor sekitar  $5 + 53 = 58$ . Pemda yang benar-benar melapor sekitar 53 Laporan Keuangan dan yang seharusnya melapor tetapi tidak melapor sekitar 4 Pemda. Selanjutnya, tabel di atas memberi nilai overall percentage sekitar 74.1% yang artinya ketepatan model penelitian ini adalah sekitar 74.1%.

**Hasil Uji Regresi Logistik**

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Logistik**

	<b>B</b>	<b>S.E.</b>	<b>Wald</b>	<b>Df</b>	<b>Sig.</b>
LEV	39.486	18.810	4.406	1	0.036
Findep	5.142	2.780	3.421	1	0.064
Constant	-1.820	.952	3.655	1	0.056

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Didasarkan hasil output pada tabel 5 yang merupakan hasil analisis dari regresi logistik didapatkan rumus persamaan regresi logistik berikut:

$$IFR = -1.820 + 39.486LEV + 5.142Findep + e$$

Didasarkan persamaan regresi logistik diatas, dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diantaranya:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sekitar -1.820, artinya jika variabel independen nilainya tetap (konstan), maka nilai *Internet Financial Reporting* (IFR) sekitar -1.820.
2. Variabel *Leverage* (LEV) punya nilai koefisien positif sekitar 39.486 artinya jika tiap naik satu-satuan opini audit pada asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan memberi peningkatan nilai *Internet Financial Reporting* (IFR) sekitar 39.486
3. Variabel *Financial Dependence* (Findep) punya nilai koefisien negatif sekitar 5.142, artinya jika tiap naik satu-satuan yang dipakai pada asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan adanya penurunan nilai *Internet Financial Reporting* (IFR) sekitar 5.142.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Parsial t (Uji t)**

**Tabel 6. Hasil Uji t  
In the Equation**

	<b>B</b>	<b>S.E.</b>	<b>Wald</b>	<b>df</b>	<b>Sig.</b>
Step 1 <sup>a</sup> X1	39.486	18.810	4.406	1	.036
X2	5.142	2.780	3.421	1	.064
Constant	-1.820	.952	3.655	1	.056

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Pada jumlah pengamatan sekitar ( $n=85$ ) dan jumlah variabel independen dan dependen sekitar ( $k=3$ ), maka *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-k = 85-2 = 83$ , pada tingkatan signitifikan  $\alpha = 0,05$ . Maka  $t_{tabel}$  bisa dihitung memakai rumus Ms Excel dan rumus *insert function* berikut:

$$t_{tabel} = \text{TINV}(\text{Probability}, \text{deg\_freedom})$$

$$t_{tabel} = \text{TINV}(0,05,83)$$

$t_{tabel} = 1.98896$

Didasarkan tabel 6 dapat didapatkan hasil uji hipotesis dengan memakai analisis regresi logistik, berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) *Leverage* punya pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Hasil uji wald (t) memberi petunjuk hasil jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $4.406 > 1.98896$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkatan signifikannya ( $0.036 < 0.05$ ). Didasarkan hasil pengujian itu didapatkan kesimpulan jika H1 yang memberi pernyataan *Leverage* punya pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* diterima. Hal ini dapat simpulkan jika punya pengaruh signifikan antara *Leverage* terhadap *Internet Financial Reporting*.
2. Hipotesis kedua (H2) *Financial Dependence* punya pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Hasil uji wald (t) memberi petunjuk hasil jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3.421 > 1.98896$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkatan signifikannya ( $0.064 > 0.05$ ). Didasarkan hasil pengujian itu didapatkan kesimpulan jika H2 yang memberi pernyataan *Financial Dependence* punya pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* ditolak. Hal ini dapat simpulkan jika tidak punya pengaruh signifikan antara *Financial Dependence* terhadap *Internet Financial Reporting*.

## 2. Uji Simultan (Uji f)

**Tabel 7. Hasil Uji f  
Omnibus Test of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	17.351	2	.000
	Block	17.351	2	.000
	Model	17.351	2	.000

Sumber: Hasil pengelolaan data dengan SPSS

Pada jumlah pengamatan sekitar ( $n=85$ ) serta jumlah variabel independen dan dependen sekitar ( $k=3$ ), maka *degree of freedom* ( $df1$ ) =  $k-1 = 3-1 = 2$  dan ( $df2$ ) =  $n-k = 85-2 = 83$ , pada tingkatan signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Maka  $f_{tabel}$  bisa dihitung memakai rumus Ms Excel dan rumus *insert function* berikut:

$$f_{tabel} = \text{FINV}(\text{Probability}, \text{deg\_freedom1}, \text{deg\_freedom2})$$

$$f_{tabel} = \text{FINV}(0,05,2,83)$$

$$f_{tabel} = 3.106507$$

Didasarkan tabel 7 dapat didapatkan nilai  $f_{hitung}$  lebih besar dari  $f_{tabel}$  ( $51.356 > 3.106507$ ) dengan tingkatan signifikansi ( $0.000 < 0.05$ ), maka H3 diterima. Hingga didapatkan kesimpulan jika *Leverage* dan *Financial Dependence* secara simultan punya pengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. *Leverage* dapat menjadi alat agar mengukur beberapa besar perusahaan memiliki ketergantungan di pemberi pinjaman dalam mendanai sumber daya perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkatan pemakaian yang tinggi menyiratkan jika perusahaan itu sangat memiliki ketergantungan di kredit dari luar agar mendanai sumber dayanya. Sementara itu, perusahaan yang memiliki tingkatan pemakaian rendah mendanai lebih banyak sumber dayanya dengan modal sendiri. *Leverage* mempunyai pengaruh dan sentralitas terhadap Perincian terkait Web Money di Wilayah Sumatera Selatan. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , lebih spesifiknya  $4,406 > 1,98896$  dan nilai likelihood lebih kecil dari tingkatan sentralitas (0,036).
2. *Financial Dependence* merupakan ketergantungan pemerintahan daerah Di Indonesia, ketergantungan pemerintahan daerah tampak dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Berbagai penelitian memberi petunjuk jika daerah yang menerima DAU lebih besar memiliki tingkatan pengungkapan informasi keuangan yang sangat tinggi. *Financial dependence* tidak mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* di Provinsi Sumatera Selatan Hal ini didapatkan bukti di  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $3,421 > 1,98896$  dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkatan signifikansi ( $0,064 > 0,05$ ).
3. Didasarkan hasil uji hipotesis didapatkan angka probabilitas dari seluruh variabel  $0,000 < 0,05$ , yang artinya dimana variabel *Leverage*, dan *Financial Dependence* punya pengaruh secara simultan terhadap *Internet Financial Reporting* pemerintahan di provinsi Sumatera Selatan.

### Saran

1. Pemerintahan pusat perlu memberi peringatan dan sanksi yang tegas bagi pemerintahan daerah yang tidak memberi ungkapan laporan keuangan secara online (*Internet Financial Reporting*). Hal itu dikarenakan dalam Intruksi Mendagri Nomor 188.52/179/SJ Tahun 2012 memberi pernyataan jika pemerintahan daerah wajib menyiapkan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran di website resmi pemerintahan daerah
2. Memakai populasi kabupaten/kota di Indonesia sebagai objek penelitian, tidak hanya sebatas di provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintahan daerah kabupaten/kota Sumatera Selatan sebaiknya membuat publikasi laporan keuangannya di internet (*Internet Financial Reporting*) agar konsisten di tiap periode sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
4. Dapat memberi penambahan variabel independen lain yang masih jarang dipakai seperti dalam upaya melihat kondisi *Internet Financial Reporting*

pemerintahan daerah yang dianggap berpotensi ketika memberi pengaruh *Internet Financial Reporting*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-faktor yang memberi pengaruh internet financial reporting pemerintahan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.226>
- Berlinski, S., Dewan, T., & Dowding, K. (2012). *Accounting for ministers: Scandal and survival in British government 1945-2007*. New York: Cambridge University Press.
- Diptyana, P. (2019). Pengaruh faktor keuangan pemerintahan daerah terhadap kualitas internet financial reporting. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 513–530.
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pengungkapan internet financial reporting (IFR) pada pemerintahan daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 33–45.
- Husna, N. Z., & Priyadi, M. P. (2018). Faktor-faktor yang memberi pengaruh internet financial reporting. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khikmawati, I., & Agustina, L. (2015). Analisis rasio keuangan terhadap pelaporan keuangan pada internet pada website perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i1.781>
- Kurniawan, C. H., & Dcorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-faktor yang memberi pengaruh ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintahan daerah di Indonesia. *Modus*, 31(2), 184-206.
- Mariasari, V. (2023). Pengaruh kekayaan daerah, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkatan pendidikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 110–134. <https://doi.org/10.25170/jak.v17i1.3728>
- Moehardiono, I. A., Yuliati, A., & Ekonomi, F. (2021). Aktadmin, +34453-100576-1-CE+2-hal+717-727. *Jurnal*, 717–727.
- Monica, D., Amarilia, I. O., Argamaya, D., & Pratiwi, M. W. (2020). Faktor-faktor yang memberi pengaruh pengungkapan internet financial reporting. *Media Riset Akuntansi*, 10, 2088-2106.
- Nainggolan, T. A., & Purwanti, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang memberi

pengaruh transparansi informasi keuangan daerah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX*.

Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of internet financial reporting disclosure. *Islamic Accounting Journal*, 1(2), 15–27. <https://doi.org/10.18326/iaj.v1i2.15-27>

Nassir Zadeh, F., Salehi, M., & Shabestari, H. (2018). The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(6), 1021–1041. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2017-0126>

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang memberi pengaruhnya pada pemerintahan kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>

Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan internet financial reporting (IFR) pada pemerintahan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 438–448. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.482>

Reskino, & Sinaga, N. N. J. (2017). Kajian empiris internet financial reporting dan praktek pengungkapan. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 16(2), 161. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i2.1643>

Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing financial condition of local government in Indonesia: An exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.

Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan daerah. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1021–2045.

Supratiknya, A. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif dalam psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Thamrin, M. M., Djou, L. D. G., & Sayang, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang memberi pengaruh pelaporan keuangan pada internet (Internet Financial Reporting) dalam website perusahaan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 149–158. <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1265>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi 30 April 2008. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846*. Jakarta.

Widaryanti. (2011). Analisis faktor - faktor yang memberi pengaruh ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 151–158.

Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor yang memberi pengaruh internet

financial reporting pada website pemerintahan daerah di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299–3309.

Yassin, M. M. (2017). The determinants of internet financial reporting in Jordan: Financial versus corporate governance. *International Journal of Business Information Systems*, 25(4), 526–556.  
<https://doi.org/10.1504/IJBIS.2017.085176>

Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintahan daerah terhadap tingkatan pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintahan daerah (Studi kasus pada Pemda Tingkatan Provinsi se-Indonesia). *Jurnal Profita*, 11, 34-52.